

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Entitas Nonlaba

2.1.1.1 Pengertian Entitas Nonlaba

Entitas nonlaba adalah suatu entitas yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Entitas nonlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, contohnya penerimaan sumbangan (Lubis, dkk. 2019).

Entitas nonlaba adalah sebuah entitas yang berjalan dalam pelayanan masyarakat yang tidak memiliki tujuan untuk menghaillkan laba. Entitas nonlaba didirikan oleh sekelompok masyarakat ataupun dikelola oleh pihak swasta. Sumber dana yang diperoleh biasanya berasal dari para donatur atau penyumbang lainnya tanpa mengharapkan imbalan dari dana yang diberikan kepada entitas tersebut (Purba et al., 2022).

Menurut PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) Entitas nonlaba merupakan entitas yang memperoleh sumber daya

dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Entitas nonlaba ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapat oleh entitas nonlaba biasanya berasal dari para donator atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang diberikan.

Menurut Hasan et al., (2021) Entitas nonlaba meliputi organisasi pada bidang keagamaan, sekolah negeri, derma publik, panti asuhan, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, beberapa petugas pemerintah, serta yayasan pendidikan. Ukuran keberhasilan yang hendak dicapai entitas nonlaba bukan keuntungan secara materi, tetapi untuk pelayanan sosial. Namun hal tersebut bukan berarti entitas nonlaba tidak boleh menghasilkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang diperoleh dari aktivitas entitas semata-mata ditujukan hanya untuk menutupi biaya yang timbul dari kegiatan operasional atau keuntungan yang diperoleh akan disalurkan kembali pada kegiatan utama entitas tersebut.

2.1.1.2 Tujuan Entitas Nonlaba

Entitas nonlaba memiliki tujuan tertentu yang

berhubungan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mengutamakan perolehan laba atau keuntungan dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan utama dari organisasi nonlaba adalah pendidikan, pelayanan sosial, perlindungan politik dan rekreasi (Rahayu, 2019: 39-40).

Jadi, entitas nonlaba dapat bermanfaat dan membantu pemerintah dalam mewujudkan negara dengan masyarakat yang sejahtera. Karena tidak berorientasi pada keuntungan.

2.1.1.3 Jenis-jenis Entitas Nonlaba

Sebagai entitas berorientasi nonlaba, dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Yayasan

Yayasan adalah entitas berorientasi nonlaba yang berbentuk badan hukum yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Seperti yang telah ditulis dalam KUHP Perdata Pasal 1653, Eksistensi Badan Hukum di Indonesia digolongkan menjadi tiga yaitu :

- a. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu untuk kepentingan negara dalam mengelola pemerintahan.
- b. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah untuk tujuan memperoleh keuntungan melalui aktivitas tertentu.

- c. Badan hukum yang diizinkan untuk tujuan tertentu, seperti yayasan sosial, agama dan kemanusiaan.

Berdasarkan UU No. 16/2001, ada tiga bagian yang memiliki tanggungjawab atas pengelolaan sebuah yayasan yaitu pembina, pengawas, dan pengurus. Ada beberapa tipe yayasan yang berkembang di Indonesia, yaitu :

- a. Tipe pertama adalah yayasan yang mengatur kegiatan soasial dan keagamaan secara langsung, seperti mendirikan sebuah instusi pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Dimana, jika yayasan menerima kelebihan hasil, kelebihan dana tersebut akah digunakan untuk operasional yayasan.
- b. Tipe kedua adalah yayasan hanya berfokus pada pengumpulan yang akan disumbangkan kepada organisasi-organisasi sosial, seperti panti asuhan, rumah sakit dalam bentuk beasiswa.
- c. Tipe ketiga adalah yayasan yang mendirikan perseoran terbatas untuk menjalankan bisnis-bisnis dari yayasan seperti, pabrik dan usaha lainnya yang menghasilkan laba. Hasil laba dari kegiatan usaha teresbut akan di donasikan untuk kegiatan social.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Secara umum, ada

dua jenis organisasi kemasyarakatan di Indonesia yaitu organisasi kemasyarakatan sesuai nasionalisme-sekuler dan nasionalisme-religius. Ada beberapa organisasi kemasyarakatan, yaitu karang taruna, posyandu, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Dewan Kelurahan. Sedangkan untuk organisasi kemasyarakatan di bidang keagamaan yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama, Front Pembela Islam (FPI), dan lain-lain (Natasya, S., 2021).

Beberapa tugas yang ada harus dilakukan oleh tim organisasi kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : PHN-29.LT.02.01 Tanggal 01 April 2011 mengenai Pembentukan Tim Pengkajian Hukum tentang Peran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat yaitu :

- a. Mengidentifikasi segala permasalahan hukum
- b. Mempelajari dan menganalisis

Memberikan saran, upaya serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang baik dan sistematis.

2.1.1.4 Karakteristik Entitas Nonlaba

Entitas berorientasi nonlaba dan entitas berorientasi laba memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu cara memperoleh sumber dana yang akan digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan operasionalnya. Entitas berorientasi nonlaba memperoleh sumber dana dari penyedia sumber dana yang tidak menginginkan keuntungan dari apa yang telah diberikan..

Karakteristik entitas nonlaba dalam menjalankan operasinya tidak bertujuan untuk menghasilkan Laba atau keuntungan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap struktur, visi serta misi dari entitas nonlaba. Sehingga dapat disimpulkan, entitas berorientasi nonlaba adalah entitas yang dibentuk secara sukarela yang tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan. Sumber daya entitas nonlaba berasal dari sumbangan atau donasi anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan (Natasya, S., 2021). Namun demikian, dalam praktik entitas nonlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya.

Sebuah entitas nonlaba harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Sumber daya entitas Nonlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan dana yang telah diberikan.

- b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nonlaba menghasilkan laba, maka tidak akan dibagi kepada para pendiri atau pemilik entitas nonlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan lazim pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan entitas nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas Nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nonlaba (IAI, 2018).

2.1.2 Panti Asuhan

2.1.2.1 Pengertian panti asuhan

Salah satu jenis atau yang termasuk entitas nonlaba adalah panti asuhan. Panti Asuhan atau Panti Sosial Asuhan Anak atau disebut juga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) ialah lembaga sosial nonlaba yang menampung, mendidik dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu dan anak telantar.

Beberapa pengertian Panti asuhan di antaranya: Menurut Kemensos RI (2004), Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak

dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Panti Asuhan merupakan rumah memelihara dan merawat anak-anak yatim atau yatim piatu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan keterampilan pada anak asuh sebagai wadah pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak agar bisa mandiri dan menjadi manusia berkualitas dengan masa depan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Purba et al (2022) Panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan secara sengaja oleh pemerintah atau masyarakat yang bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan, penyantunan dan pengentasan anak terlantar dan memiliki fungsi sebagai pengganti peranan orang tua dalam memenuhi kebutuhan mental dan sosial pada anak asuh agar mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mengalami pertumbuhan fisik dan mengembangkan pemikiran hingga mereka mencapai tingkat kedewasaan yang matang dan mampu melaksanakan peranannya sebagai individu dan warga negara didalam kehidupan bermasyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Panti Asuhan

Para pemilik panti mungkin memiliki tujuan tersendiri pada anak-anak asuhnya, namun sebenarnya pemerintah telah mengatur tujuan panti asuhan seperti yang tertuang dalam keterangan yang diatur oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia (2004), yaitu diantaranya :

- a. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka kearah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
- b. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya pemerintah dan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial, khususnya panti asuhan ini, memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan, bimbingan, dan keterampilan serta membentuk karakter mereka agar dapat menjadi manusia yang

sesuai harapan negara dan dapat bersaing dalam hal meraih cita-cita mereka nantinya.

2.1.2.3 Fungsi Panti Asuhan

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2004), panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak
- b. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak
- c. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari panti asuhan ialah untuk memberikan pelayanan, informasi, konsultasi, dan pengembangan keterampilan bagi kesejahteraan sosial anak

2.1.3 Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2014:2) “Laporan keuangan menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2020 : 17) penyajian laporan keuangan haruslah menunjukkan informasi termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan

informasi yang relevan, andal, dapat dipertimbangkan, dan mudah dipahami.

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan suatu organisasi dalam suatu periode yang menjabarkan kinerja dari organisasi tersebut (Dinanti & Nugraha, 2018: 3). Secara umum tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada para pemakai yang akan digunakan sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan (Sirait, 2014: 20).

Dalam penyusunan laporan keuangan perlu diperhatikan bagaimana penyusunannya sehingga memberikan informasi yang jelas kepada penggunaannya. Oleh karena itu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan 9 Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) menyusun Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya. (Dinanti & Nugraha, 2018: 3)

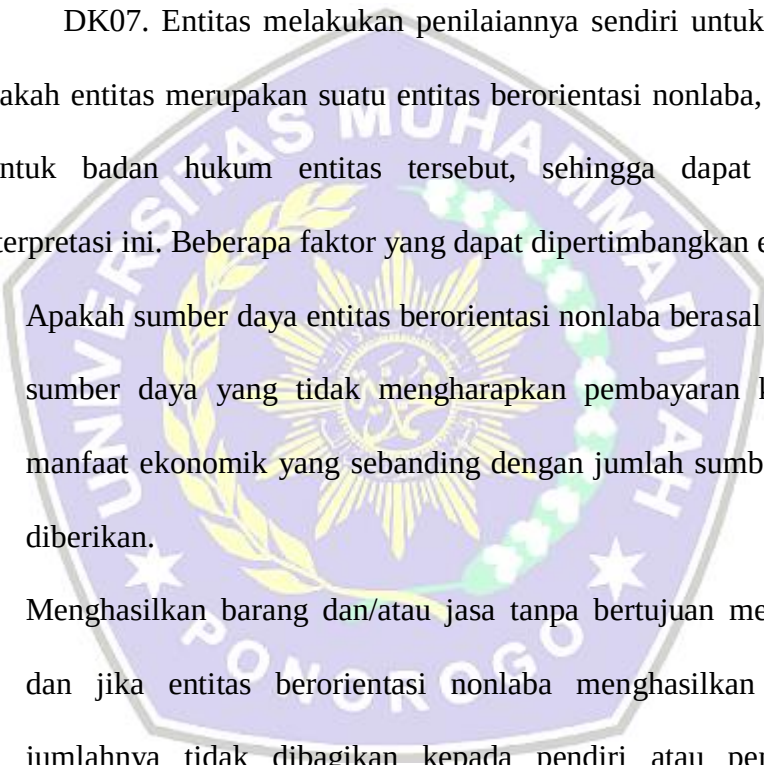
2.1.4 Ruang Lingkup dan Permasalahan ISAK 35

DK04. Ruang lingkup DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba memberikan pedoman penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba sebagai interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05. DK05. Interpretasi ini diterapkan juga oleh entitas berorientasi nonlaba yang menggunakan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

DK06. Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dan ruang lingkup entitas berorientasi nonlaba tidak ditemukan. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak memberikan definisi atau kriteria untuk membedakan entitas berorientasi nonlaba dari entitas bisnis berorientasi laba.

DK07. Entitas melakukan penilaiannya sendiri untuk menentukan apakah entitas merupakan suatu entitas berorientasi nonlaba, terlepas dari bentuk badan hukum entitas tersebut, sehingga dapat menerapkan interpretasi ini. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan entitas adalah

- 
- a Apakah sumber daya entitas berorientasi nonlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
 - b Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi nonlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut.
 - c Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi nonlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian

sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi nonlaba.

2.1.5 Interpretasi Dasar Kesimpulan (DK) dari DE ISAK 35

DK08. IAS 1 *Presentation of Financial Statements* paragraf 5 sebagai acuan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan paragraf 05 mengizinkan entitas berorientasi nonlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan laporan keuangan itu sendiri. PSAK 1 tidak memberikan penjelasan atau contoh lebih atas penyesuaian tersebut.

DK09. Interpretasi ini dilengkapi dengan contoh ilustratif yang merupakan bagian dari DE ISAK 35. Contoh ilustratif mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.6 Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Menurut ISAK 35

Entitas nonlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 tepatnya pada tanggal 11 april 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Dimana

sebelumnya untuk entitas nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah diganti menjadi ISAK 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka entitas nonlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 (IAPI, 2020). Pada saat mengesahkan ISAK 35 Dewan Standar Akuntansi Keuangan juga menerbitkan PPSAK 13 yang berisi pencabutan PSAK 45 pelaporan keuangan entitas nonlaba (DE PPSAK 13, Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba, 2018).

Penyajian laporan keuangan entitas nonlaba disusun dengan memperhatikan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian Laporan keuangan mengizinkan entitas nonlaba menyesuaikan deskripsi yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan itu sendiri. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018: 35.2)

Menurut ISAK 35 tujuan penggunaan laporan keuangan entitas nonlaba pada umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:

- a. Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
- b. Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018: 35.1).

Laporan keuangan entitas nonlaba dijelaskan dalam Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) Nomor 35 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nonlaba.

Menurut IAI (2014) tujuan utama laporan keuangan entitas nonlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nonlaba. Sumber daya tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan rutin yang dilakukan didalam entitas nonlaba. Standar yang mengatur mengenai laporan entitas nonlaba mengharuskan agar entitas nonlaba dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Salah satu jenis yang masuk ke dalam kategori nonlaba adalah panti asuhan (Yanti et al, 2022).

Penerapan akuntansi pada entitas nonlaba pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan entitas bisnis atau komersial, yang membedakan adalah cara entitas nonlaba memperoleh sumber dana untuk menjalankan berbagai aktivitas operasinya. Hal ini terlihat pada aturan atau ketentuan akuntansi entitas nonlaba yang diatur sebagai bagian dari Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tepatnya pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Pada ISAK No 35 menjelaskan mengenai teknis pelaporannya yang diserahkan kepada entitas masing-masing untuk mengaturnya dengan mengikuti format laporan yang telah ada. Laporan keuangan

entitas nonlaba mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset netto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas dan aset bersih pada waktu tertentu. Berikut penulis akan menguraikan tentang tujuan laporan posisi keuangan, klasifikasi aset dan liabilitas, klasifikasi aset netto tanpa pembatasan dan aset netto dengan pembatasan. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas dan aset netto serta informasi tentang keterkaitan antara unsur-unsur tersebut. Laporan keuangan entitas mencakup secara keseluruhan dan menyajikan total aset, liabilitas, dan aset netto.

Laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan aset netto. Terdapat 2 (dua) format Laporan Posisi Keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran ISAK 35. Setiap format memiliki keunggulan masing-masing.

1. Aset

Menurut PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan. Pada umumnya entitas menyajikan dan mengumpulkan aset kelompok yang homogen. diantaranya adalah:

- a) Kas dan setara kas
- b) Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa lain
- c) Persediaan
- d) Sewa, asuransi, dan jasa lain yang dibayar dimuka
- e) Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang
- f) Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lain yang digunakan untuk menghasilkan barang jasa

2. Liabilitas

Menurut IASC, Liabilitas adalah kewajiban masa kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyesuaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Liabilitas disusun berdasarkan urutan jatuh tempo dari liabilitas/ kewajiban tersebut. Kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun digolongkan kewajiban lancar, sedangkan kewajiban yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun digolongkan kepada kewajiban jangka Panjang. Contoh urutan dan penyajian liabilitas/ kewajiban adalah:

- a) Pendapatan diterima dimuka
- b) Utang Jangka pendek
- c) Utang jangka Panjang
- d) Utang Lainnya

3. Aset neto

Aset neto pada umumnya merupakan modal yang didapat dari aset dikurangi liabilitas. Tetapi, dalam laporan posisi keuangan entitas nonlaba aset neto dibagi menjadi dua yaitu:

a) Aset neto tanpa pembatasan

Merupakan aset yang tidak mempunyai pembatasan atas penggunaan aset tersebut. Contohnya, dana yang didapat dari donatur tanpa memberikan keterangan apapun, dana tersebut dapat digunakan entitas untuk memenuhi segala kebutuhannya.

b) Aset neto dengan pembatasan

Merupakan aset yang dibatasi penggunaannya oleh pemberi sumber daya, contohnya pemberian tanah bangunan dengan tujuan tertentu seperti kas anak yatim dan kas kafir miskin. Lebih sederhananya, donatur memberikan sumber daya dengan syarat – syarat tertentu.

Terdapat 2 (format) laporan posisi keuangan yang disajikan sebagai contoh dalam lampiran:

a) Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi

penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya.

- b) Format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri.

Berikut merupakan contoh format laporan posisi keuangan

ISAK 35 :



ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Aset Lancar</i>	XXXX	XXXX
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti Investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Aset Tidak Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Liabilitas Jangka Pendek</i>	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Liabilitas Jangka Panjang</i>	XXXX	XXXX
TOTAL LIABILITAS	XXXX	XXXX
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions)</i>		
<i>dari pemberi sumber daya</i>		
Surplus akumulasian	XXXX	XXXX
Penghasilan komprehensif lain	XXXX	XXXX
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari</i>		
<i>pemberi sumber daya</i>	XXXX	XXXX
TOTAL ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Gambar 2.1 Format Laporan Posisi Keuangan (Format A)

Sumber: ISAK 35

ENTITAS XYZ Laporan Posisi Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	202x	202x
ASET		
<i>Aset Lancar</i>		
Kas dan setara kas	XXXX	XXXX
Piutang bunga	XXXX	XXXX
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Aset lancar lain	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Aset Lancar</i>		<u>XXXX</u>
<i>Aset Tidak Lancar</i>		
Properti Investasi	XXXX	XXXX
Investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Aset tetap	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Aset Tidak Lancar</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL ASET	XXXX	XXXX
LIABILITAS		
<i>Liabilitas Jangka Pendek</i>		
Pendapatan diterima di muka	XXXX	XXXX
Utang jangka pendek	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Liabilitas Jangka Pendek</i>	XXXX	XXXX
<i>Liabilitas Jangka Panjang</i>		
Utang jangka panjang	XXXX	XXXX
Liabilitas imbalan kerja	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Total Liabilitas Jangka Panjang</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Total Liabilitas	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
ASET NETO		
<i>Tanpa pembatasan (without restrictions)</i>		
<i>dari pemberi sumber daya</i>		
<i>Dengan pembatasan (with restrictions) dari</i>		
<i>pemberi sumber daya</i>	XXXX	XXXX
Total Aset Neto	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Gambar 2.2 Format Laporan Posisi Keuangan (Format B)

Sumber: ISAK 35

b. Laporan penghasilan komprehensif

Laporan keuangan komprehensif merupakan laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu entitas dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan komprehensif ini digunakan untuk mengetahui kinerja suatu entitas dalam pengelolaan keuangan (Dwikasmanto, 2020: 47). Dalam ISAK 35 terdapat dua buah format laporan penghasilan komprehensif, yaitu:

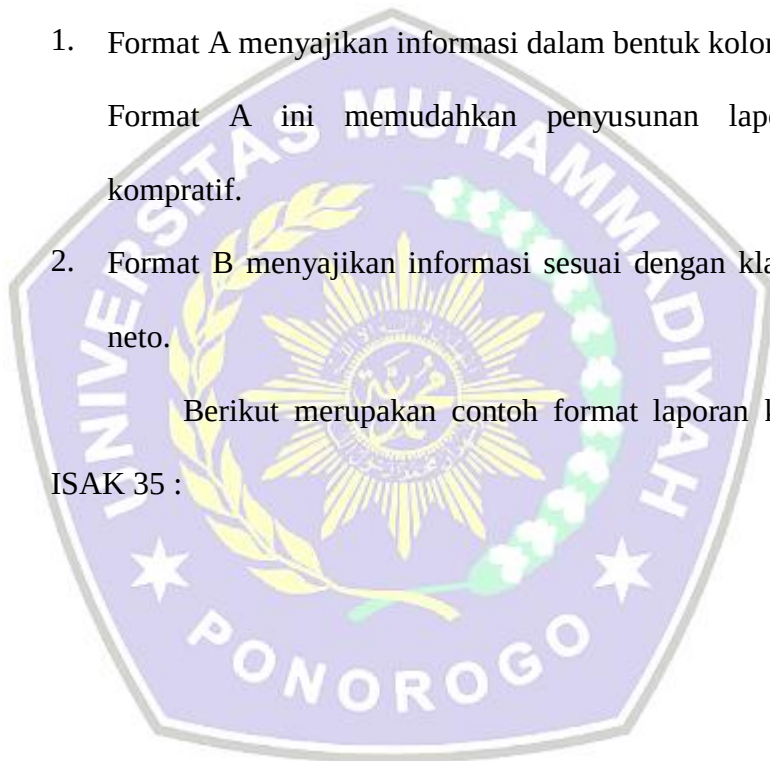
1. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal.

Format A ini memudahkan penyusunan laporan secara kompratif.

2. Format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto.

Berikut merupakan contoh format laporan komprehensif

ISAK 35 :



ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Jasa layanan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka pendek	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<i>Total Pendapatan</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Beban</i>		
Gaji, upah	XXXX	XXXX
Jasa dan profesional	XXXX	XXXX
Administratif	XXXX	XXXX
Depresiasi	XXXX	XXXX
Bunga	XXXX	XXXX
Lain-lain	XXXX	XXXX
<i>Total Beban</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
<i>Total Beban</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Surplus (Defisit)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER		
DAYA		
<i>Pendapatan</i>		
Sumbangan	XXXX	XXXX
Penghasilan investasi jangka panjang	XXXX	XXXX
<i>Total Pendapatan</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Beban</i>		
Kerugian akibat kebakaran	XXXX	XXXX
Surplus (Defisit)	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Gambar 2.3 Format Laporan Komprehensif (Format A)

Sumber: ISAK 35

ENTITAS XYZ Laporan Penghasilan Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)						
	Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	20xx Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah	Tanpa Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	20xx Dengan Pembatasan Dari Pemberi Sumber Daya	Jumlah
PENDAPATAN						
Sumbangan	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Jasa Layanan	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Penghasilan investasi jangka pendek	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Total Pendapatan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
BEBAN						
Gaji, Upah	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Jasa profesional dan	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Depresiasi	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Bunga	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Lain-lain	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Total Beban	xxx	-	xxx	xxx	-	xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Total Beban	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Surplus (Defisit)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx

Gambar 2.4 Format Laporan Komprehensif (Format B)

Sumber: ISAK 35

c. Laporan perubahan aset neto

Merupakan laporan perubahan aset neto menyajikan informasi aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya (Diviana S et al., 2020).

Berikut merupakan contoh format laporan perubahan aset neto

ISAK 35 :

ENTITAS XYZ Laporan perubahan Aset Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20xx	20xx
ASET NETO TANPA PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Aset neto yang dibebaskan dari pembatasan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<i>Penghasilan Komprehensif Lain</i>		
Saldo awal	xxxx	xxxx
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	<u>xxxx</u>	xxxx
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Total	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
ASSET NETO DENGAN PEMBATAAN DARI PEMBERI SUMBER DAYA		
Saldo awal	xxxx	xxxx
<i>Surplus tahun berjalan</i>	xxxx	xxxx
Asset neto yang dibebaskan dari pembatasan	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Saldo akhir	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
TOTAL ASSET NETO	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>

Gambar 2.5 Format Laporan Perubahan Aset Neto

Sumber: ISAK 35

d. Laporan arus kas

Didalamnya memberikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran suatu entitas dalam satu periode tertentu. Menurut SAK ETAP, didalam laporan arusen kas terdapat beberapa informasi mengenai:

1. Aktivitas operasi

Aktivitas operasi ini diperoleh dari aktivitas utama penghasilan entitas. Berupa transaksi, kegiatan, dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi laba dan rugi.

2. Aktivitas investasi

Aktivitas investasi ini didapatkan dari pengeluaran kas yang memiliki tujuan untuk mendapatkan penghasilan dimasa yang akan datang.

3. Aktivitas pendanaan

Yaitu aktivitas yang dapat mempengaruhi perubahan komposisi aset dan liabilitas, contoh aktivitas pendanaan adalah pelunasan pinjaman dan penerimaan kas dari pinjaman, arus kas pendanaan dapat bernilai surplus dan defisit.

Berikut merupakan contoh format laporan arus kas ISAK 35 :

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Kas dari sumbangan	XXXX	XXXX
Kas dari pendapatan jasa	XXXX	XXXX
Bunga yang diterima	XXXX	XXXX
Penerimaan lain-lain	XXXX	XXXX
Bunga yang dibayarkan	XXXX	XXXX
Kas yang dibayarkan kepada karyawan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan yang dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	XXXX
Investasi bangunan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Gambar 2.6 Laporan Arus Kas (Metode langsung)

Sumber: ISAK 35

ENTITAS XYZ Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X2 (dalam jutaan rupiah)		
	20X2	20X1
AKTIVITAS OPERASI		
Rekonsiliasi surplus (defisit) menjadi kas neto dari aktivitas operasi:		
Surplus	XXXX	XXXX
Penyesuaian untuk:		
Depresiasi	XXXX	XXXX
Penurunan piutang bunga	XXXX	XXXX
Penurunan dalam utang jangka pendek	XXXX	XXXX
Penurunan dalam pendapatan diterima di muka	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Kas neto dari aktivitas operasi</i>	XXXX	XXXX
AKTIVITAS INVESTASI		
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	XXXX	XXXX
Pembelian peralatan	(XXXX)	(XXXX)
Penerimaan dari penjualan investasi	XXXX	XXXX
Pembelian investasi	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</i>	(XXXX)	(XXXX)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<i>Penerimaan dari sumbangan dibatasi untuk:</i>		
Investasi dalam dana abadi (<i>endowment</i>)	XXXX	XXXX
Investasi dalam bangunan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
<i>Aktivitas pendanaan lain:</i>		
Bunga yang dibatasi untuk reinvestasi	XXXX	XXXX
Pembayaran liabilitas jangka panjang	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>
<i>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan</i>	(XXXX)	(XXXX)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>

Gambar 2.7 Laporan Arus Kas (Metode tidak langsung)

Sumber: ISAK 35

e. Catatan atas laporan keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang memberikan informasi tambahan, pendukung, maupun penunjang atas laporan keuangan pokok yang akan memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membacanya.

2.1.7 Tujuan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba

Menurut IAI, (2014:45.2) Tujuan utama laporan keuangan entitas nonlaba adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nonlaba.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan laporan keuangan entitas nonlaba, di antaranya sebagai berikut:

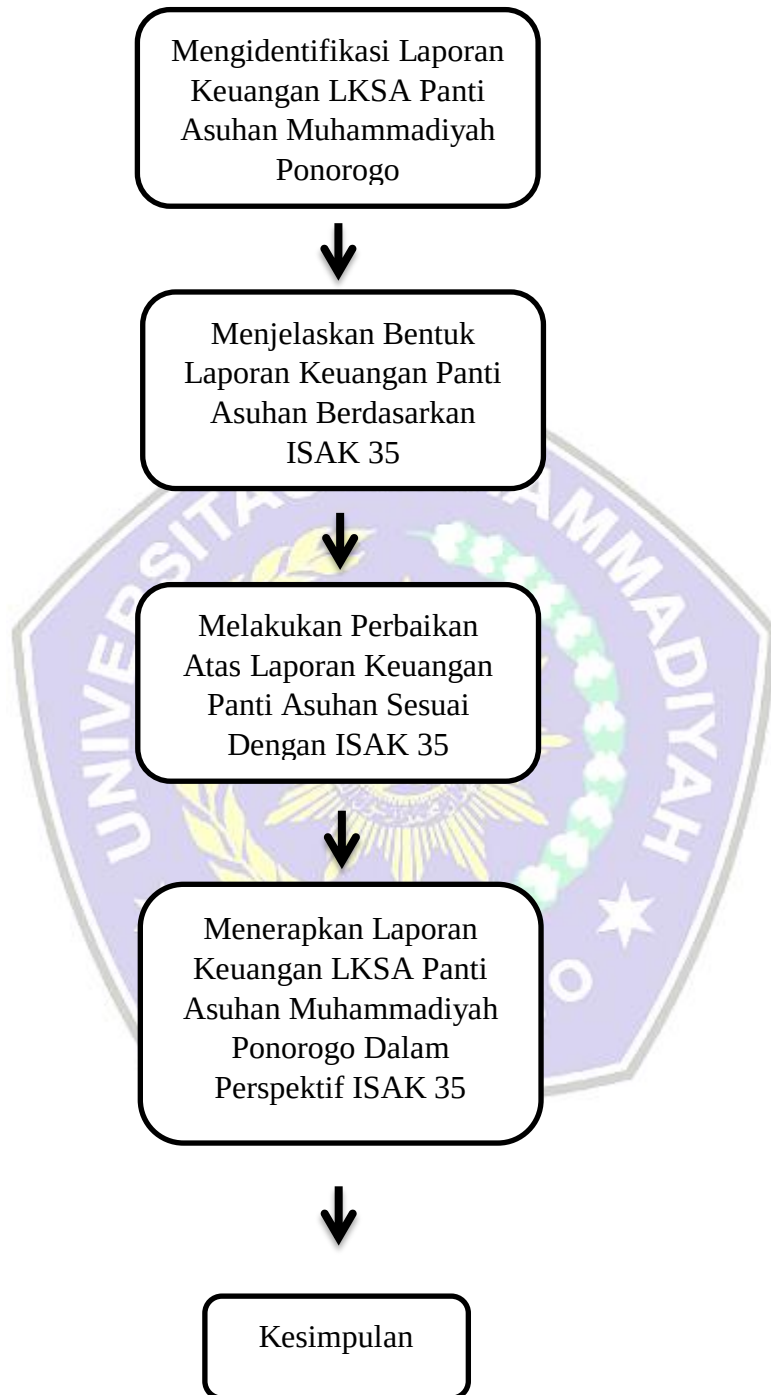
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Lasfita, N., & Muslimin, M. (2020)	Analisis Penerapan ISAK No. 35 Pada Organisasi Keagamaan Masjid AlMabrur Sukolilo Surabaya	(a) pengelolaan dan pencatatan keuangan masjid Al-Mabrur Surabaya masih sederhana yang masih sebatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran masjid; (b) masjid AlMabrur Surabaya masih belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ISAK No. 35 karena dalam pembuatan laporan keuangan di masjid AlMabrur Surabaya hanya mengacu pada laporan keuangan masjid pada umumnya; (c) sistem penerimaan yang didapatkan oleh masjid Al-Mabrur Surabaya diperoleh dari infaq jum'at, infaq idul fitri, infaq idul adha, infaq donatur dan lain-lain.
2.	Yulinartati, Y., & Martiana, N. (2022)	Analisis Penerapan ISAK 35 Pada Yayasan Panti Asuhan Jombang	Sumber penerimaan dana Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan Jombang Jember diperoleh dari sumbangan dari masyarakat dan kaleng berkah yang dikumpulkan setiap hari

		Jember	sabtu oleh para donator. Sistem pengeluaran dana Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan Jombang Jember belum disusun secara rinci misalnya pengeluaran Operasional Umum. Bentuk laporan pada Yayasan Panti Asuhan Darush Shibyan Jombang Jember belum sesuai dengan standar akuntansi yaitu ISAK 35 karena pada laporan Yayasan hanya melakukan pemasukan dan pengeluaran, sehingga dalam menyusun laporan keuangannya menghasilkan saldo akhir
3.	Purba, S., et al., (2022)	Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Kasih Murni Tahun 2021)	Panti Asuhan Kasih Murni menggunakan laporan keuangan sederhana yang hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Organisasi menyajikan laporannya dalam tiga bentuk, yaitu laporan hasil kegiatan, laporan bulanan dan laporan tahunan. Secara keseluruhan, laporan keuangan organisasi tidak sesuai dengan standar akuntansi yang ada.
4.	Setiawati, B., & Hafni, D. A. (2023)	Implementasi ISAK 35 Pada Laporan Keuangan Panti Asuhan	Proyeksi laporan keuangan PAMNK yang sesuai dengan ISAK 35 dapat memberikan informasi lebih baik kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Agar sesuai dengan ISAK 35, tahap pertama yang harus dilakukan adalah dengan menjurnal atas transaksi bulanan, kemudian melakukan posting buku besar, jurnal penyesuaian dan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35 terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, laporan keuangan saat ini terbatas hanya pada laporan penerimaan dan pengeluaran kas bulanan saja. Kurangnya pemahaman atau kompetensi sumber daya manusia (staf bagian administrasi keuangan) Panti di bidang akuntansi, mengakibatkan laporan keuangan Panti yang sesuai ISAK 35 belum dapat disajikan.
5.	Purba, S., et al., (2023)	Implementasi ISAK 35 Laporan Finansial Organisasi Non Laba Pada Panti Asuhan Terang Fajar	Panti Asuhan Terang Fajar dalam hal pertanggungjawaban laporan finansial hanya berupa selemba kertas atau dengan kata lain faktur yang berisikan pemasukan dan pengeluaran. Selain daripada itu donatur yang membantu Panti Asuhan Terang Fajar juga tidak meminta secara detail mengenai laporan finansial mereka hanya meminta dokumentasi berupa video dan foto sehingga Panti Asuhan Terang Fajar hingga saat ini belum memiliki laporan finansial yang seturut dengan standar yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 35

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini digambarkan pada ilustrasi bagan sebagai berikut :



Gambar 2.8 Kerangka Konseptual Penelitian

Penjelasan atas gambar tersebut, sebagai berikut :

1. Pertama, peneliti mencari atau mencatat informasi mengenai laporan keuangan pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo.
2. Kemudian, menjelaskan bagaimana itu konsep laporan keuangan yang menggunakan ISAK 35, baik itu dari segi informasi maupun cara pengerjaannya.
3. Selanjutnya, peneliti melakukan perbaikan atas laporan keuangan yang mana pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo belum melaksanakannya yaitu sesuai ISAK 35.
4. Selanjutnya, peneliti menerapkan bagaimana cara membuat laporan keuangan organisasi nirlaba dalam hal ini laporan keuangan LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo yang sesuai dengan berdasarkan ISAK 35.
5. Terakhir, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian pada LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Ponorogo.

